

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 9 Desember 2019
Waktu : 10.00 s.d. 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Konsultasi/Koordinasi Komisi II DPRD Kabupaten Tanah
Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan terkait Program DPR RI
mengenai Pertanian serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : B. Hadir Tamu Undangan:
1. H. Muh. Alpiya Rakhman, S.E., M.M. (Koordinator);
2. H. Sayid Umar Al-Idrus, S.E. (Ketua Komis II);
3. I Wayan Sudarma, S.Sos., M.M. (Wakil Ketua Komisi II);
4. Hj. Hamsiah (Sekretaris);
5. H. Bahsanuddin, S.Sos., M.A.P. (Anggota);
6. H. Bobby Rakhman, S.H., M.H. (Anggota);
7. Harmanuddin, S.H. (Anggota);
8. Abdul Rahim (Anggota);
9. Tri Joko Iswanto (Anggota);
10. Tarmiji (Anggota);
11. Salamiah (Pendamping);
12. Wahyudi (Pendamping).

I. PENDAHULUAN

Komisi IV DPR RI menerima audiensi dari Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan membahas mengenai Program DPR RI mengenai Pertanian serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. PERMASALAHAN/ASPIRASI

1. Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu meminta dilakukan evaluasi terhadap bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian, karena bantuan Alsintan realisasinya tidak sesuai dengan kondisi lahan pertanian di lapangan.
2. Tahun 2009-2014 Pemerintah memberikan bantuan ternak sapi secara signifikan, tetapi untuk Tahun 2014-2019 tidak mendapatkan bantuan ternak sama sekali, kecuali bantuan unggas 50 ayam per kepala rumah tangga (Program BEKERJA). Untuk itu, Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun 2020 meminta dukungan terkait bantuan ternak.
3. Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu meminta untuk dilakukan evaluasi terhadap ijin pembukaan lahan untuk perkebunan. Jangan sampai lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan sawit (oleh perusahaan), karena saat ini di Kabupaten Tanah Bumbu ada perusahaan yang membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit di atas lahan hutan. Namun di lokasi tersebut masih ada masyarakat yang bermukim dan masyarakat tidak tersentuh bantuan maupun tidak menjadi petani plasma perkebunan. Disamping itu, program cetak sawah yang diselenggarakan oleh Pemerintah akan mengalami kesulitan karena lokasi tersebut adalah hutan produksi dan adanya alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.
4. Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu meminta dilakukan evaluasi terhadap Program SK Bersama 4 (empat) Kementerian terkait dengan kebijakan kehutanan, dimana masyarakat sekitar tidak bisa menguasai maupun memanfaatkan lahannya.
5. Saat ini terdapat permasalahan pencemaran lingkungan oleh PT Borneo Indo Bara (tambang batubara) yang mencemari 500 ha lahan program cetak sawah dari Kementerian Pertanian. Lahan tersebut juga merupakan area hutan, sehingga Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu meminta dukungan Komisi IV DPR RI terkait kerugian yang dialami oleh masyarakat atas permasalahan tambang dan perkebunan kelapa sawit, karena tidak ada ganti rugi untuk masyarakat atas pembukaan tambang dan perkebunan kelapa sawit tersebut.

6. Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu meminta dukungan Komisi IV DPR RI terhadap kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat di sekitar hutan.

III. TANGGAPAN KOMISI IV DPR RI

Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian/Lembaga mitra Komisi IV DPR RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.00 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP.196301221991031001